

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang

Mutia Utami Fajria Subuh*, Iip Permana

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Abstrak: MySimkari merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Tim IT Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membantu dalam proses pengolahan data kepegawaian dan layanan kepegawaian di seluruh lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang dan kendala hal yang menjadi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, digunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MySimkari belum sepenuhnya efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan MySimkari di Kejaksaan Negeri Padang diantaranya, masih terdapat pegawai yang masih abai dalam menggunakan MySimkari, adanya fitur-fitur yang belum dapat diakses, serta masalah terkait *maintenance* dan gangguan jaringan.

Kata Kunci: Efektivitas, MySimkari, Sistem Informasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.234>

*Correspondence: Mutia Utami Fajria Subuh

Email: mutiautami263@gmail.com

Received: 15-01-2025

Accepted: 26-02-2025

Published: 07-03-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract: MySimkari is an application developed by the Bureau of Personnel of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia to assist the process of processing personnel data and personnel services throughout the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the Attorney General's Office Management Information System (MySimkari) for Employees at the Padang District Attorney's Office and the obstacles that become obstacles in its implementation. This study uses a descriptive qualitative research method. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation. The location of the study was at the Padang District Attorney's Office. To analyze the data, the Miles and Huberman model analysis technique was used, which included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the use of MySimkari is not fully effective because there are several obstacles faced in the implementation of MySimkari at the Padang District Attorney's Office, including there are still employees who are still neglectful in using MySimkari, the existence of features that are not yet accessible, and problems related to maintenance and network disruptions.

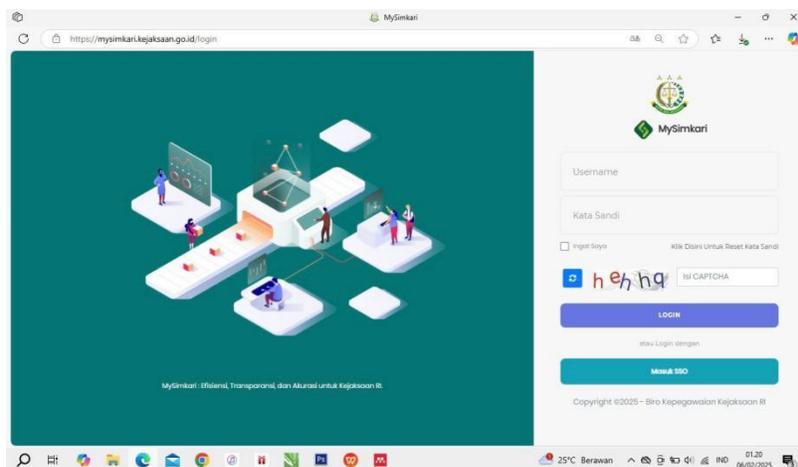
Keywords: Effectiveness, MySimkari, Information Systems

Pendahuluan

Dalam dunia globalisasi saat ini, perkembangan pesat dalam teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan bagi berbagai organisasi. Dengan perubahan teknologi yang pesat ini, aktivitas pengelolaan data dan pekerjaan manual telah tergantikan oleh teknologi. Kegiatan yang digunakan saat ini berkaitan dengan menggunakan media elektronik. Adanya media elektronik menjadikan kegiatan administrasi organisasi menjadi lebih baik, cepat, dan akurat. Dalam kegiatan pengelolaan data memerlukan suatu sistem pengolahan informasi yaitu, Sistem Informasi Manajemen (SIM). Menurut Rahman, W. & Saudin, L. (2022: 60), SIM merupakan suatu jaringan prosedur pengolahan data yang dirancang dan disetujui dalam sebuah organisasi, bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kepada manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan demi mencapai tujuan yang diinginkan. SIM melibatkan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi informasi dalam suatu organisasi.

Penggunaan SIM sangat penting bagi pegawai, karena membantu mengintegrasikan data dan menyimpan dokumen dalam format digital. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tugas yang berkaitan dengan kepegawaian. Pengembangan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan manajemen kepegawaian yang lebih efektif dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Sholeha, 2023). Penciptaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah salah satu penerapan inovasi digital dalam bidang teknologi informasi. Sistem ini dirancang agar dapat diakses langsung oleh para pegawai, terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Rahmananda et al., 2024).

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga tidak terlepas dari pemanfaatan sistem informasi. Kejaksaan telah membuat aplikasi berbasis *web* bernama MySimkari yang dapat digunakan oleh semua pegawai untuk mengelola data dan layanan mereka. MySimkari dikembangkan pada tahun 2022 dan telah diterapkan di seluruh lingkungan Kejaksaan. Aplikasi MySimkari dilatarbelakangi oleh kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Melalui Pengintegrasian dan Pembangunan Big Data Bidang Kepegawaian menyebutkan bahwa pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk mengaktifasi akunnya, serta melakukan pengisian dan pembaruan data kepegawaian pada aplikasi kepegawaian.



Gambar 1. Tampilan MySimkari

Menurut Buku User Manual MySimkari oleh Kejaksaan Republik Indonesia, MySimkari adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengolahan data kepegawaian, serta mempermudah analisis dan pengawasan dalam manajemen kepegawaian. Pengembangan MySimkari bertujuan untuk mendukung integrasi data, meningkatkan kemudahan akses, dan mempermudah pengelolaan, sehingga dapat memastikan kelancaran pelaksanaan dan fungsi administrasi kepegawaian yang lebih efektif dan efisien. Tentunya, solusi untuk berbagai permasalahan administrasi ini bertujuan untuk mengelola seluruh data dan informasi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, data dapat diberikan dengan cepat, lengkap dan akurat setiap saat (Rosmalina, 2018). Aplikasi ini memiliki beragam fitur yang dirancang untuk mendukung pekerjaan pegawai, antara lain menu layanan utama di dashboard, profil pegawai, jabatan, pendidikan, dosir, serta dokumen-dokumen lain. Selain itu, terdapat juga menu layanan untuk satya lencana, usulan kenaikan pangkat, proses dari CPNS ke PNS, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul fungsional, dan pensiun.

Dalam penerapan MySimkari memiliki beberapa masalah. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang ditemukan, yaitu adanya pengguna yang masih abai dalam menerapkan aplikasi MySimkari, hal tersebut disebabkan oleh pegawai yang lalai atau malas sehingga berdampak pada produktivitas dalam penerapan MySimkari. Yang kedua, masih adanya fitur yang belum dapat digunakan oleh pengguna, karena masih dalam proses pengembangan yang masih ada secara manual. Yang ketiga, *maintenance* sistem secara berkala dari pusat sehingga mengakibatkan gangguan dalam mengakses MySimkari.

Berdasarkan penjelasan dan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan

Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang”.

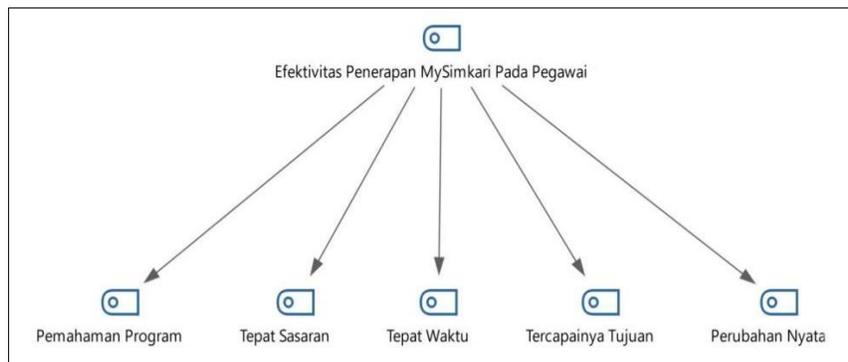
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode ini menghasilkan data dalam bentuk deskripsi, bukan angka, sehingga dapat memenuhi tujuan penelitian sesuai harapan. Lokasi penelitian tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Untuk memastikan keabsahan data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode triangulasi. Selanjutnya, kerangka teori Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 247-252), digunakan untuk melakukan analisis data, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

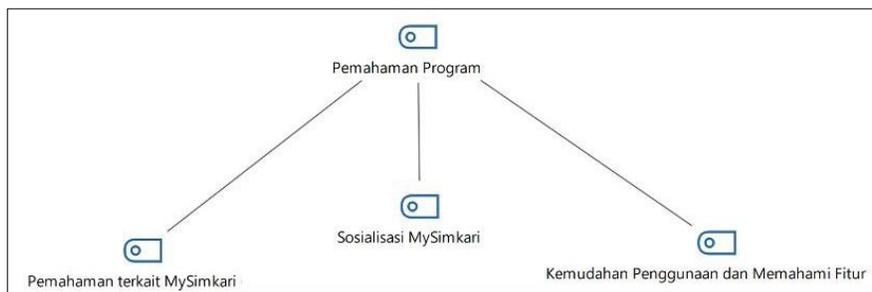
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang

Teori Pengukuran Efektivitas, yang dikemukakan oleh Sutrisno (dalam Assiroj, 2023), akan digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang. Teori ini menggunakan indikator efektivitas seperti a) pemahaman program, b) tepat sasaran, c) tepat waktu, d) tercapainya tujuan, dan e) perubahan nyata.



Gambar 2. MAXQDA Efektivitas Penerapan MySimkari Pada Pegawai

a. Pemahaman Program



Gambar 3. MAXQDA Pemahaman Program

Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan mengerti informasi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Dalam konteks ini, pemahaman tentang program merujuk pada kemampuan pegawai untuk memahami dan menguasai cara penggunaan sistem informasi manajemen kepegawaian dengan baik (Ismail¹ et al., 2024). Jika mengacu pada Sutrisno (dalam Assiroj, 2023), pemahaman program mendefinisikan sejauh mana pengguna dapat memahami program atau aplikasi. Pemahaman yang mendalam memudahkan perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana pegawai dapat memahami dan mengaplikasikan MySimkari dengan baik.

Dalam Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang pada indikator pemahaman program sudah berjalan efektif. Para pegawai di Kejaksaan Negeri Padang telah memahami apa itu MySimkari, mereka sudah tahu dan mengerti mengenai penggunaan MySimkari tersebut. Kemudahan dalam memahami setiap fitur dan layanan menjadi landasan penting untuk menjalin interaksi yang baik antara pengguna dan aplikasi. Saat pengguna merasa bahwa fitur-fitur tersebut mudah dipahami, mereka cenderung merasa lebih nyaman dan percaya diri saat menggunakan aplikasi tersebut (Devona et al., 2024). Sebagaimana, fitur dan data yang tersedia dalam MySimkari telah memberikan kemudahan bagi pegawai dalam pengelolaan data dan layanan kepegawaian. MySimkari menyediakan berbagai fitur, antara lain profil pegawai, jabatan, pendidikan, dosir, serta dokumen-dokumen lain. Dan juga adanya layanan untuk usulan kenaikan pangkat, satya lencana, proses dari CPNS ke PNS, dan pensiun.

Untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai MySimkari, sosialisasi menjadi langkah penting yang diperlukan. Penelitian oleh Komalasari et al. (2014)

menunjukkan bahwa, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan, pemahaman, dan praktik pengelolaan data kepegawaian yang berbasis teknologi. Sosialisasi ini sangat penting untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang terintegrasi yang dapat menghasilkan data berkualitas tinggi. Dengan demikian, diharapkan efektivitas organisasi dapat meningkat, dan pengelolaan *database* kepegawaian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, efektif, serta dengan tingkat keterbukaan informasi yang tinggi. Kejaksaan Agung telah melaksanakan sosialisasi ini kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk Kejaksaan Negeri Padang yang juga berpartisipasi. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara *online* melalui platform *zoom*, serta secara luring apabila terdapat informasi terbaru terkait penggunaan MySimkari. Kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya strategis untuk memastikan kelancaran penerapan MySimkari. Melalui sosialisasi, para pegawai dapat memahami tujuan, manfaat dan mekanisme kerja MySimkari tersebut.

Dengan demikian, pegawai di Kejaksaan Negeri Padang kini sudah memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan MySimkari dan dapat mengenali berbagai fitur data yang tersedia di dalamnya. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang telah dilakukan serta semua pegawai terlibat aktif dalam pengelolaan MySimkari dan memiliki akun pribadi untuk mengakses aplikasi tersebut.

b. Tepat Sasaran



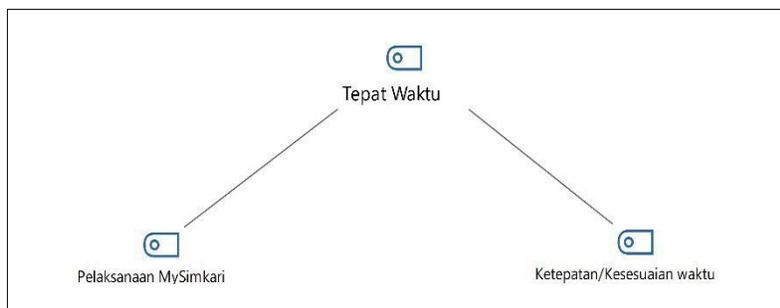
Gambar 4. MAXQDA Tepat Sasaran

Sasaran merujuk pada pencapaian yang diharapkan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, indikator tepat sasaran digunakan untuk mengevaluasi apakah aplikasi tersebut bermanfaat bagi pegawai serta apakah program yang terdapat dalam aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan pegawai di Kejaksaan Negeri Padang (Ismail¹ et al, 2024). Jika mengacu pada teori Sutrisno (dalam Assiroj, 2023), yaitu indikator ini menilai seberapa baik program dirancang untuk mencapai sasaran tertentu dan apakah organisasi berhasil mencapai sasaran tersebut.

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang pada indikator tepat sasaran belum sepenuhnya berjalan efektif. Sasaran utama penerapan MySimkari adalah seluruh pegawai. Namun, dari sisi target penggunaan MySimkari, belum semua pegawai melakukan pembaruan data secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan ketidakakuratan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Salah satu penyebabnya adalah adanya pegawai yang berusia lanjut dan kurangnya perhatian mereka dalam mengakses MySimkari.

Dapat dipahami bahwa, seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan RI termasuk sasarannya. Setiap pegawai memiliki akun masing-masing, jadi yang bersangkutan mempunyai akun MySimkari. Hadirnya MySimkari sangat membantu mendukung pegawai dalam pengolahan data kepegawaian secara *online* di lingkungan Kejaksaan.

c. Tepat Waktu



Gambar 5. MAXQDA Tepat Waktu

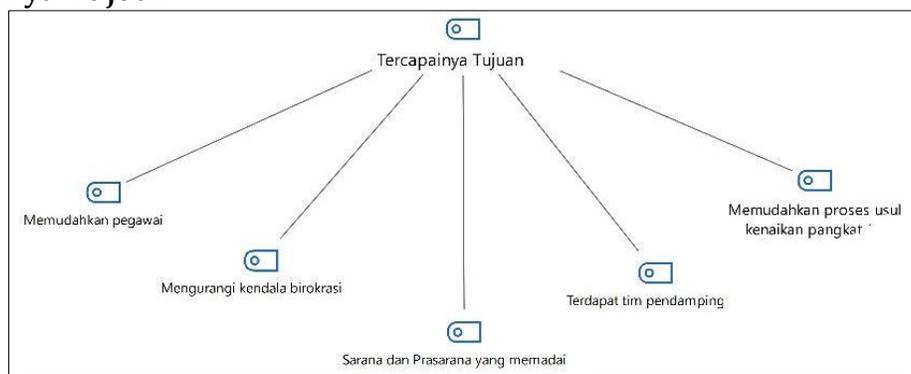
Tepat waktu adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, kewajiban, atau aktivitas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Semakin tepat waktu pelaksanaan program, semakin efektif pula program tersebut dapat direalisasikan (Utami et al., 2024). Menurut teori Sutrisno (dalam Assiroj, 2023), indikator ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam merealisasikan program. Dalam penelitian ini, tepat waktu dimaksudkan untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai dalam mengisi dan memperbarui data, serta memberikan layanan kepegawaian melalui MySimkari di lingkungan Kejaksaan Negeri Padang.

Dalam Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang, indikator tepat waktu telah menunjukkan cukup efektif. MySimkari dikembangkan pada tahun 2022, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemakaian waktu yang sangat lama. Seluruh pegawai diharapkan selalu melakukan *update* data pribadi secara mandiri. Hal ini terlihat dari beberapa pegawai yang berhasil mengisi

data mereka secara tepat waktu, meskipun masih ada beberapa yang belum melakukannya dengan sesuai.

Penelitian oleh Angkoso et al. (2019) menunjukkan bahwa, pelayanan yang tepat waktu dapat meningkatkan kualitas layanan karena dapat mendapatkan data yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu, semakin cepat dan akurat informasi yang disampaikan, semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam hal usulan layanan kepegawaian untuk kenaikan pangkat pada MySimkari, pegawai tidak lagi perlu mengantarkan berkas dan menggunakan dokumen fisik untuk urusan administrasinya. Pegawai cukup mengunggah data dan melengkapi persyaratan usulan layanan melalui MySimkari. Jika layanan tersebut sudah selesai, informasi mengenai status layanan dapat diakses dan dipantau melalui MySimkari, sehingga pegawai dapat menerima hasilnya dengan cepat dan tepat waktu.

d. Tercapainya Tujuan



Gambar 6. MAXQDA Tercapainya Tujuan

Indikator tercapainya tujuan menunjukkan apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai tujuan program atau tidak (Ismail¹ et al, 2024). Pada fokus pencapaian tujuan, terdapat dua sub fokus yang perlu diperhatikan, yaitu pencapaian tujuan program itu sendiri serta fungsi dan manfaat dari program yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait (Nisak et al., 2024). Mengacu pada Sutrisno (Assiroj, 2023), indikator ini mengukur apakah tujuan pembuatan program telah tercapai atau belum. Tujuan dari penerapan MySimkari ini adalah untuk mendukung integritas data, memenuhi kebutuhan pegawai secara digital seperti perubahan data dan menyimpan data pegawai, serta bertujuan mengurangi kendala birokrasi yang dialami pegawai sehingga dalam proses administrasi menjadi lebih mudah.

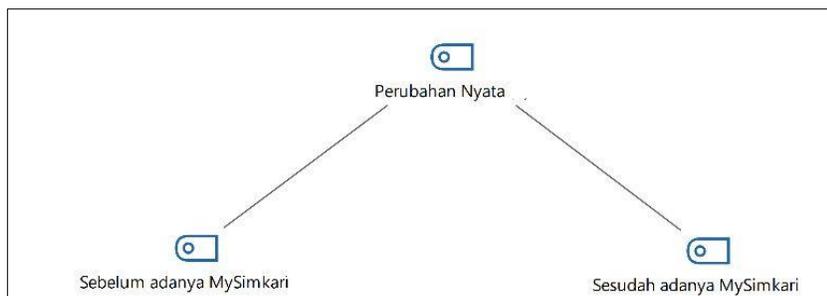
Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang menunjukkan

bahwa indikator tercapainya tujuan belum berjalan secara efektif. Salah satu penyebabnya adalah belum semua fitur dalam sistem tersebut diaktifkan, sehingga penggunaan layanan kepegawaian belum dapat memberikan kemudahan yang optimal.

Tujuan penggunaan MySimkari telah berhasil dicapai oleh pegawai dari manfaat dan kemudahan menggunakannya. Sarana dan prasarana merujuk pada berbagai jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama dan pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan. Sarana dan prasarana juga terkait organisasi kerja (Palealu et al., 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Husni et al. (2023), dinyatakan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang sangatlah penting bagi setiap organisasi. Pengelolaan yang baik ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sarana prasarana merujuk pada berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dengan pengelolaan yang tepat, sarana dan prasarana akan terpelihara dengan baik serta kegunaannya akan jelas terlihat. Di Kejaksaan Negeri Padang, fasilitas seperti, internet, komputer, printer, dan scanner telah dioptimalkan untuk mendukung penggunaan MySimkari. Selain itu, pegawai tidak harus bergantung pada perangkat yang ada di kantor karena MySimkari dapat diakses melalui perangkat pribadi mereka, kapan saja dan di mana saja.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pegawai merasa lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi ini, yang membantu mempermudah dan mempercepat pekerjaan mereka. Dalam penggunaan MySimkari, salah satu fitur yang telah dapat dimanfaatkan adalah layanan usulan kenaikan pangkat, yang sudah oleh para pegawai. Dengan adanya fitur ini, pegawai tidak perlu lagi menggunakan dokumen fisik. Meskipun demikian, MySimkari belum sepenuhnya mempermudah layanan kepegawaian, karena masih ada beberapa fitur dalam proses pengembangan.

e. Perubahan Nyata



Gambar 7. MAXQDA Perubahan Nyata

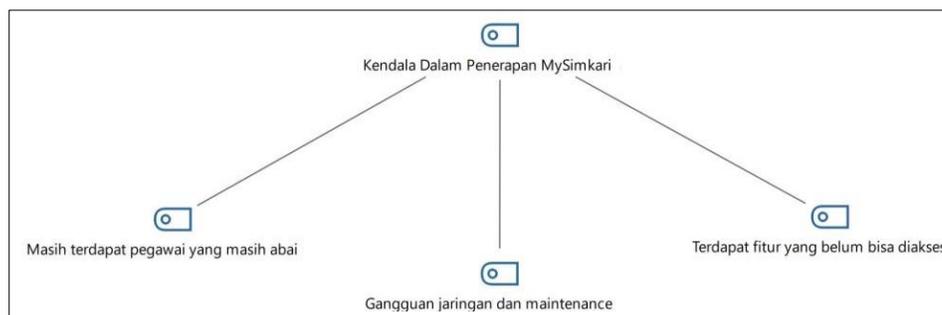
Perubahan adalah keadaan di mana kondisi yang ada sebelumnya berbeda dari kondisi yang ada sekarang (Maulida et al., 2023). Menurut konsep Sutrisno (dalam Assiroj, 2023), indikator perubahan nyata mengukur dampak nyata dari program dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah adanya program. Hal ini memungkinkan untuk menentukan sejauh mana program membawa perubahan atau dampak. Dengan melakukan perubahan, diharapkan baik pegawai maupun organisasi dapat meningkatkan keadaan.

Melihat Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang menunjukkan bahwa indikator perubahan nyata masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa fitur yang masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum dapat digunakan meskipun fitur tersebut sudah ada di MySimkari. Di sisi lain, masih terdapat beberapa pekerjaan yang dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya dapat dilakukan secara *online*.

Perubahan yang signifikan telah dirasakan oleh pegawai Kejaksaan Negeri Padang sejak penerapan MySimkari. Sistem ini pengelolaan dan pemutakhiran data, memungkinkan penyimpanan data yang lebih aman dan praktis. Data yang akan diinput oleh pegawai biasanya berupa file dalam format PDF, dan data yang telah diinput akan secara otomatis tersimpan di sistem (Apulliza et al., 2024). Selain itu, dalam layanan kenaikan pangkat, pegawai kini merasakan kemudahan dibandingkan sebelumnya. Sebelum hadirnya MySimkari, pengelolaan data kepegawaian dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kehilangan informasi. Dulu, pegawai harus mengumpulkan berkas persyaratan dalam bentuk fisik, namun kini mereka hanya perlu mengunggah dokumen tersebut melalui MySimkari. Di bidang kepegawaian, digitalisasi proses administrasi juga telah mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan demikian, adanya penyimpanan data secara digital di MySimkari, pencarian informasi pun menjadi jauh lebih mudah, dibandingkan dengan dokumen fisik yang rentan terhadap kehilangan atau kerusakan.

Kendala Dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang

Dari penelitian penulis dilapangan, menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Manajemen (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang, yaitu:



Gambar 8. MAXQDA Kendala Dalam Penerapan MySimkari

a. Masih terdapat pegawai yang masih abai

Temuan penelitian yang didapatkan, keberhasilan penggunaan MySimkari di Kejaksaan Negeri Padang sangat bergantung pada partisipasi pegawai. MySimkari dirancang untuk mendukung digitalisasi administrasi dan pengelolaan data kepegawaian dalam lingkungan Kejaksaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya melakukan pengisian atau memperbarui data mereka. Para pegawai menghadapi kesulitan dalam menggunakan fitur aplikasi tersebut, terutama terkait ketika mereka harus mengisi data pegawai secara menyeluruh. Mereka tidak hanya perlu memasukkan data terbaru, tetapi juga harus mengisi informasi yang mencakup seluruh riwayat pegawai sejak diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Banyaknya data yang harus diinput ini juga mengakibatkan pihak operator menghadapi kendala tambahan. (Irianto et al., 2023). Akibatnya terjadi ketidaksadaran yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian pegawai terhadap akun mereka, yang akhirnya berujung pada rasa malas dan abai dalam menggunakan MySimkari.

Keterlambatan dalam pengelolaan ini mencerminkan sikap abai, yakni kurangnya perhatian dan tanggung jawab terhadap hal yang seharusnya menjadi kewajiban pegawai. Jika sikap abai ini terus ada, hal ini berpotensi menghambat efektivitas kerja serta penerapan kebijakan di lingkungan Kejaksaan. Perlu dipastikan agar semua pegawai memahami fungsi MySimkari dan merasa didukung dalam memberikan kontribusi terbaik. Dengan demikian, tujuan digitalisasi di Kejaksaan dapat tercapai secara efektif.

b. Terdapat fitur yang belum bisa diakses

Berdasarkan temuan yang ada, seharusnya dalam pemanfaatan digitalisasi, semua proses telah beralih ke sistem digital tanpa lagi melibatkan cara manual. Namun, kenyataannya di lingkungan Kejaksaan masih terdapat beberapa pekerjaan yang dilakukan secara manual, terutama dalam layanan kepegawaian. Fitur-fitur dalam

aplikasi tentunya memerlukan pemrograman yang mutakhir untuk pengelolaan data yang efektif. Hal ini penting agar fitur-fitur tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai. Jika terdapat beberapa program yang tidak dipakai, sebaiknya dihapus, sementara itu, program-program yang kurang dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsi aplikasi (Irianto et al., 2023). Aplikasi MySimkari sendiri memiliki fitur menu layanan yang sangat diperlukan oleh pegawai, namun masih ada beberapa fitur yang belum diaktifkan dan belum bisa diakses oleh mereka. Salah satu layanan yang masih dilakukan secara manual adalah pengajuan cuti atau izin. Kejaksaaan telah mengembangkan MySimkari sebagai solusi untuk mengurangi pekerjaan manual serta penggunaan kertas. Ketidaktersediaan akses ke beberapa fitur ini dapat berdampak negatif pada kelancaran proses kerja, terutama bagi sistem yang bergantung pada integrasi data secara *real-time*. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembaruan sistem secara berkala serta memberikan pelatihan kepada pengguna agar semua fitur dapat diakses dengan baik.

c. Gangguan Jaringan dan *Maintenance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan jaringan dan *maintenance* yang mendadak dapat mengakibatkan masalah dalam sistem seperti *error* dan server yang lambat, yang mana pada akhirnya berdampak pada kelancaran aktivitas pegawai. Terkait koneksi internet, saat ini kita semua menyadari bahwa internet memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Koneksi yang lemah dapat menghambat efektivitas pengawasan, karena akses terhadap data yang diperlukan sangat bergantung pada kestabilan koneksi internet (Mukarramah et al., 2020). Masalah jaringan sering kali menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem seperti MySimkari. Akses ke MySimkari sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, mengingat sistem ini diakses secara *online*. Selain itu, kurangnya perawatan berkala juga dapat menghambat akses data. *Maintenance* seringkali dilakukan dari pusat, yang dapat berakibat tidak bisa digunakannya aplikasi MySimkari. Oleh karena itu, diperlukan adanya perawatan yang terstruktur dan terjadwal untuk mengurangi risiko gangguan jaringan dan memastikan kinerja sistem yang optimal.

Kesimpulan

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaaan Negeri Padang secara keseluruhan belum bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari indikator pemahaman program menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan efektif. Pada indikator tepat

waktu sudah cukup efektif, karena sebagian pegawai sudah mengisi data tepat waktu. Namun, masih terdapat beberapa pegawai yang belum tepat dalam mengisi data. Di sisi lain, indikator tepat sasaran, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata belum dapat dianggap efektif. Meskipun demikian, hadirnya MySimkari telah membawa dampak baik dengan penggunaan yang sudah mulai dipahami oleh mayoritas pegawai. Aplikasi ini memberikan dukungan terhadap kinerja pegawai Kejaksaan dengan membantu pengelolaan data dan layanan kepegawaian secara *online* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) Pada Pegawai di Kejaksaan Negeri Padang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya masih adanya pegawai yang kurang memperhatikan penggunaan tugas dan tanggung jawabnya pada sistem ini, adanya fitur-fitur yang belum dapat diakses, serta masalah terkait *maintenance* dan gangguan jaringan.

Daftar Pustaka

- Angkoso, S. P., Rahmanto, A. N., & Slamet, Y. S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelayanan Bidang Akademik Kepada Mahasiswa. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1(2), 234. <https://doi.org/10.24198/jmk.v1i2.9563>
- Apulliza, A., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Penginputan Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janintra)*, 4(1)
- Assiroj, P. (2023). Efektivitas aplikasi E-arsip pada Kantor imigrasi kelas I tpi cilacap. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), 54. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.406>
- Buku User Manual MySimkari oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
- Devona, N. F., Octavianti, N. M., & Risanti, N. Y. D. (2024). Persepsi Kemudahan Aplikasi Bank Jago (Studi Deskriptif pada Pemberi Komentar Instagram @jadijago Kurun Waktu November 2023 – Januari 2024). *TUTURAN Jurnal Ilmu Komunikasi Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 315–337. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1155>
<https://doi.org/10.55499/intelektual.v10i1.1043>
- Husni, M., Idris, M., & Maryadi. (2023). Pengaruh Sistem Informasi, Sarana Prasarana dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. *Ezenza Journal*, 2(3), 302-316

Instruksi Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Melalui Pengintegrasian dan Pembangunan Big Data Bidang Kepegawaian

Irianto, N. H., Ratnawati, N. S., & Tyas, N. F. S. (2023). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA. *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 10(1), 89–97.

Ismail, A., Rendra Anggoro, M. A., & Daweng, M. (2024). Efektivitas penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) Di badan kepegawaian Dan pengembangan sumber daya manusia (Bkpsdm) dinas pendidikan. *Journal o Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(4), 103–1038. <https://doi.org/10.70248/jmie.v1i4.1068>

Komalasari, S. (2014). Aplikasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(4), 613–619. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/433>

Maulida, W., Rudiana., & Sutisna, J. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 3(1)

Mukarramah, M., & Arbani, T. S. (2022). Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg). *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 263–269. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15411>

Nisak, N. I., & Hertati, D. (2024). Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) di DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo. *NeoRespublica Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 440–452. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.221>

Pelealu, R. R., Nayoan, H., & Sampe, S. (2022). Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Governance*, 2(2)

Rahman, W. & Saudin, L. (2022). *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Rahmananda, A., Ayu, K. P., & Setiawan, F. S. (2024). Efektivitas Inovasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Menunjang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 10(2)

Rosmalina, R. (2018). ANALISIS APLIKASI KEPEGAWAIAN PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (SIMKARI) DI

KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG. *JURNAL PETIK*, 4(2), 173–178.
<https://doi.org/10.31980/jpetik.v4i2.364>

Sholeha, P. R. (2023). Efektivitas penggunaan sistem informasi kepegawaian dalam manajemen pns Di Kantor wilayah kementerian hukum Dan hak asasi manusia Lampung. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.37090/jpap.v3i1.942>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Utami, Y., Khairi, H., & Sartika, I. (2024) Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Action Research Literate*, 8(4), 649-660. <https://doi.org/10.46799/ar1.v8i4.297>